



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 DI KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya dalam penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Swasta Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Purbalingga secara obyektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan usia, domisili, minat dan bakat calon peserta didik maka perlu dilakukan penerimaan peserta didik baru yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2021/2022 DI KABUPATEN PURBALINGGA.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidayah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada jenjang TK, SD dan SMP melalui mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan.
9. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

10. Dalam Jaringan, yang selanjutnya disingkat daring adalah sistem pengelolaan kegiatan PPDB dengan menggunakan jaringan internet, melalui penggunaan aplikasi khusus yang dioperasikan pada waktu bersamaan.
11. Luar Jaringan, yang selanjutnya disingkat luring adalah sistem pengelolaan kegiatan PPDB tanpa menggunakan jaringan internet.
12. PPDB Jalur Afirmasi adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP dengan pertimbangan utama yaitu calon peserta didik berasal dari keluarga kurang mampu.
13. PPDB Jalur Perpindahan Tugas adalah penerimaan peserta didik baru pada Jenjang Pendidikan TK, SD dan SMP karena Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik harus melaksanakan tugas ke tempat lain yang berbeda dengan alamat domisili yang tercantum pada Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk.
14. PPDB Jalur Prestasi adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan SMP dengan pertimbangan utama yaitu calon peserta didik yang memiliki prestasi berdasarkan nilai rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) pada Surat Keterangan Lulus atau Nilai Raport Sekolah/Madrasah semester VII (tujuh) s.d XI (sebelas) Tahun Pelajaran 2020/2021 dan atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten.
15. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dalam seleksi penerimaan peserta didik.
16. Prestasi adalah kemampuan lebih calon peserta didik yang dilihat berdasarkan capaian nilai rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) pada Surat Keterangan Lulus (SKL) atau Nilai Raport Sekolah/Madrasah semester VII (tujuh) s.d XI (sebelas) Tahun Pelajaran 2020/2021 dan atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten.
17. Penghargaan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak tertentu yang berisi pernyataan atau penegasan tentang pemberian hak atas prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik seperti bidang olahraga, seni atau lainnya yang diterima oleh siswa, baik secara individu maupun kelompok dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang dapat berupa dokumen, sertifikat, prasasti dan atau ijazah.
18. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggungjawab langsung terhadap calon peserta didik yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
19. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
20. Maksud diselenggarakan PPDB adalah untuk menjamin terlaksanakannya Penerimaan Peserta Didik Baru secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
21. PPDB bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menempuh pendidikan pada jenjang TK, SD, dan SMP terdekat dengan domisili dan tidak menutup kesempatan bagi calon peserta didik yang berdomisili jauh dari TK, SD, dan SMP yang dipilih dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

- (1) Semua anak usia dini memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dalam jenjang Taman Kanak-Kanak.
- (2) Semua anak usia Sekolah Dasar memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar.
- (3) Semua lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- (4) Tidak ada penolakan calon peserta didik baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru kecuali daya tampung suatu satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sudah terpenuhi.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. objektif, artinya penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
- b. transparan, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua/wali dan peserta didik baru, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam PPDB;
- c. akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.

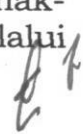
BAB V

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Organisasi Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan melalui tahapan persiapan, sosialisasi, pendaftaran, pengumuman, pendaftaran ulang, monitoring dan evaluasi.
 - (2) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah dasar, dan Sekolah Menengah Pertama ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TK, SD, dan SMP penyelenggara PPDB membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru yang susunan keanggotaannya di tetapkan dengan Keputusan Kepala TK, SD, dan SMP masing-masing.
- (3) Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Panitia PPDB jenjang TK, SD, dan SMP bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Mekanisme PPDB

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan TK dan SD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru mulai tanggal 25 Juni Tahun 2021.
- (2) Satuan Pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan PPDB mulai tanggal 28 Juni Tahun 2021.
- (3) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Calon Peserta Didik Baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. Pendaftaran
 - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru; dan
 - e. Daftar Ulang
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat informasi sebagaimana berikut :
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. untuk Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang TK dan SD jalur pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua/wali;
 - d. untuk Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SMP jalur pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali dan jalur prestasi;
 - e. daya tampung yang tersedia untuk jumlah penerimaan peserta didik baru pada kelompok TK A/B, kelas 1 (satu) SD dan kelas VII (tujuh) SMP, sesuai dengan data Rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - f. tanggal pengumuman hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru.

- (5) Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (6) Pengumuman hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (7) Penetapan Peserta Didik Baru dilakukan berdasarkan hasil Rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
 - a. daring; atau
 - b. luring.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB Jenjang TK, SD, dan SMP hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya pada saat seleksi menggunakan mekanisme daring dapat dilanjutkan dengan mekanisme luring.
- (3) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme daring.
- (4) Dalam hal Penerimaan Peserta Didik Baru tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme daring, maka Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui mekanisme luring.
- (5) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru diatur dalam petunjuk teknis yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK

Bagian Kesatu Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung TK

Pasal 9

Kuota rombongan belajar dan daya tampung calon peserta didik baru pada jenjang TK diatur sebagai berikut:

- a. jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan paling banyak 3 (tiga) rombongan belajar untuk kelas reguler;
- b. jumlah peserta didik pada satuan pendidikan TK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 20 (dua puluh) siswa, dan apabila melebihi daya tampung maka TK yang bersangkutan wajib mendapat izin Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- c. sekolah yang akan menambah jumlah rombongan belajar harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan PPDB; dan;
- d. jumlah daya tampung keseluruhan masing-masing satuan pendidikan TK dapat dilihat pada masing-masing sekolah;

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada satuan pendidikan TK diatur sebagai berikut :
 - a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun, untuk kelompok A; dan
 - b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (3) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi.
- (4) Satuan pendidikan TK wajib menerima calon peserta didik baru dari anak berkebutuhan khusus dengan kriteria mempunyai kelainan tuna netra /tuna rungu /tuna wicara /tuna grahita /tuna daksa /tuna laras /berkesulitan belajar /lambat belajar/autis /memiliki gangguan motorik/memiliki kelainan lainnya/tuna ganda dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari instansi yang berwenang, sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi.

Bagian Ketiga
Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak

Pasal 11

Seleksi Calon Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan TK diatur sebagai berikut :

- a. kriteria calon peserta didik baru pada TK dilakukan hanya berdasarkan pada aspek usia sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) bagi anak berkebutuhan khusus harus mempunyai rekomendasi dari dokter anak dan atau psikolog.
- b. apabila terdapat kesamaan kriteria Penerimaan Peserta Didik Baru diantara 2 (dua) atau lebih calon peserta didik baru, maka dilakukan urutan seleksi sebagai berikut :
 - 1) mendahulukan calon peserta didik baru yang usianya yang lebih tua;
 - 2) jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan; dan

- 3) jika usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan pada angka 2) masih sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal lebih diprioritaskan.

BAB VII

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu

Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung Sekolah Dasar

Pasal 12


Kuota rombongan belajar dan daya tampung SD diatur sebagai berikut:

- a. jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan paling banyak 4 (empat) rombongan belajar untuk kelas reguler.
- b. jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar/ kelas pada Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- c. Sekolah tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar dan/atau ruang kelas baru.
- d. apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Satuan Pendidikan SD memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Satuan Pendidikan SD tersebut wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf d pada sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- f. dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Satuan Pendidikan SD lain dalam zonasi terdekat.
- g. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- h. Satuan Pendidikan SD wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada jenjang SD yaitu:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar kelas 1(satu); atau
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada saat mendatar kelas 1 (satu).
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kelapa Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun. 

- (4) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2021 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
- (6) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak berlaku untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi.
- (7) Satuan Pendidikan SD wajib menerima calon peserta didik baru dari anak berkebutuhan khusus dengan kriteria mempunyai kelainan tuna netra/tuna rungu/ tuna wicara/tuna grahita/tuna daksa/tuna laras/berkesulitan belajar/lamban belajar/autis/memiliki gangguan motorik/menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya/memiliki keterangan/rekomendasi dari instansi yang berwenang, sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi.

Bagian Ketiga
Seleksi PPDB SD

Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada jenjang SD diatur sebagai berikut:
 - a. seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, berdasarkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 1. usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1); dan
 2. untuk jalur zonasi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke SD dan atau dalam satu wilayah kecamatan kecuali bagi siswa yang berkebutuhan khusus.
 3. untuk jalur afirmasi dibuktikan dengan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 4. untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
 - b. untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
 - c. jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan SD.
 - d. jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sama, maka lebih diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
 - e. dalam proses seleksi penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) jenjang SD tidak dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

ER

- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wilayah Kecamatan dalam lokasi sekolah berada.

BAB VIII
PPDB JENJANG SMP

Bagian Kesatu
Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung SMP

Pasal 15

Kuota rombongan belajar dan daya tampung SMP diatur sebagai berikut:

- a. jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan paling banyak 9 (sembilan) rombongan belajar untuk kelas reguler;
- b. jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar/ kelas pada SMP Negeri dan Swasta paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- c. apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB Satuan Pendidikan SMP memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Satuan Pendidikan SMP tersebut wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf c pada Satuan Pendidikan SMP lain dalam zonasi yang sama;
- e. dalam hal daya tampung pada zona yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Satuan Pendidikan SMP lain dalam zona terdekat;
- f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB;
- g. dalam pelaksanaan PPDB, SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - 1) menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/ atau
 - 2) menambah ruang kelas baru.
- h. Satuan Pendidikan SMP wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SMP

Pasal 16

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 28 Juni 2021; dan
 - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD berupa Surat Keterangan Lulus (SKL) atau dokumen lain yang setara dan sah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/ Lurah sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (3) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Surat Keterangan Lulus SD atau dokumen lain yang setara dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran PPDB SMP

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
- a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/ wali; dan
 - d. prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung SMP untuk calon peserta didik baru yang berdomisili dalam zonasi yang telah ditentukan.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah zonasi.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Zonasi sesuai domisili, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan atau Jalur Prestasi.
- (8) Satuan Pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke Jalur Zonasi atau Jalur Prestasi;
- (2) Dalam hal Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke Jalur Zonasi atau Jalur Prestasi.

Pasal 19

- (1) Dalam Pelaksanaan PPDB melalui Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), satuan pendidikan jenjang SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dalam zona yang telah ditentukan berdasarkan titik koordinat domisili calon peserta didik.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Kartu Keluarga dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili.
- (4) Satuan Pendidikan SMP memprioritaskan untuk menerima calon peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam wilayah yang sama dengan SD asal di Kabupaten Purbalingga.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan PPDB melalui Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ditujukan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu.
- (2) Calon peserta didik yang memilih Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa bukti keikutsertaan keluarga peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PPDB melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) ditujukan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan orang tua/wali.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasaan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Apabila terdapat sisa kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar bagi calon peserta didik yang memiliki orang tua/wali berprofesi sebagai guru.

Pasal 22

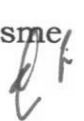
- (1) Pelaksanaan PPDB melalui Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (5) ditetapkan paling banyak 30% dari kuota yang tersedia.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan :
 - a. Nilai Rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) dalam Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Hasil Ujian atau Nilai Raport Sekolah/Madrasah semester VII (tujuh) s.d. semester XI (sebelas) Tahun Pelajaran 2020/2021; dan atau
 - b. Bonus Kejuaraan yaitu hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan atau tingkat kabupaten;
 - c. Bonus Kejuaraan yaitu hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan atau tingkat kabupaten.

Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai PPDB melalui Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai Pasal 22 dikecualikan untuk :
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ;
 - b. sekolah kerja sama ;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus ;
 - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus ;
 - e. sekolah berasrama ;
 - f. sekolah di wilayah dengan jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan penerimaan Penerimaan Peserta Didik Baru bagi Sekolah Menengah Pertama di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Bagian Keempat Seleksi PPDB SMP

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP dilaksanakan sesuai jalur pendaftaran yaitu Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Jalur Prestasi.
 - (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme daring.
- 

Pasal 25

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik Jalur Zonasi:
 - a. sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dalam zonasi sesuai titik koordinat yang telah ditentukan.
 - b. dalam hal kuota Jalur Zonasi belum terpenuhi, sekolah dapat menerima calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah sampai dengan pemenuhan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - c. jika Jalur Zonasi telah melebihi kuota 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah maka diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

- (2) Seleksi Calon Peserta Didik Jalur Afirmasi :
 - a. Seleksi Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan keluarga peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b. Pendaftar menyerahkan Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Apabila terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, maka Sekolah bersama Pemerintah Daerah akan melakukan verifikasi data dan bukti lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Peserta didik yang masuk melalui Jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

- (3) Seleksi Calon Peserta Didik Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali dengan urutan prioritas:
 - a. perpindahan antar provinsi;
 - b. perpindahan antar kabupaten;
 - c. perpindahan dari luar zonasi;
 - d. usia yang paling tinggi dari calon peserta didik;
 - e. calon peserta didik yang mendaftar lebih awal; dan
 - f. jika kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak terpenuhi maka dialihkan untuk Jalur Prestasi.

- (4) Seleksi Calon Peserta Didik Jalur Prestasi:
 - a. Seleksi Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan peringkat jumlah Nilai Rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) dalam Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Hasil Ujian atau Nilai Raport Sekolah/Madrasah semester VII (tujuh) s.d. semester XI (sebelas) Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Bonus Prestasi kejuaraan akademik maupun non akademik;
 - b. Formulasi pemeringkatan sebagaimana dimaksud huruf a diatur dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IX
DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

Pasal 26

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang peserta didik dilakukan oleh satuan pendidikan TK, SD, dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

BAB X
BIAYA

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli pakaian seragam sekolah atau buku tertentu yang dikaitkan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru.

BAB XI
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kelapa Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memeperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.



Pasal 29

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kabupaten Purbalingga setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
 - c. lulus tes kelayakan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Kabupaten Purbalingga setelah memenuhi:
 - a. fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan kepala sekolah asal;
 - c. surat keterangan direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
 - d. lulus tes kelayakan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 30

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan yang diselenggarakan SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.

BAB XII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Et

Pasal 32

Sekolah yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menggunakan mekanisme daring wajib menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang digunakan untuk membantu calon peserta didik dalam melakukan pendaftaran di sekolah tersebut.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 9 April 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 9 April 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PURBALINGGA



YANUAR ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR